

## LEMBAGA PERKREDITAN MASA KOLONIAL

### *CREDIET INSTITUTION IN COLONIAL PERIOD*

**Haryono Rinardi**

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

Pos-el: rinardiharyono@yahoo.com

#### **Abstrak**

Dengan menggunakan metode sejarah, makalah ini bertujuan mengetahui berbagai macam lembaga perkreditan resmi pada masa kolonial, terutama di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, kajian terfokus pada perkembangan tiga lembaga perkreditan di Indonesia masa kolonial, khususnya yang ada di bawah pengawasan *Volkscredietwezen*. Sebelum *volkscredietwezen* hadir, masyarakat sudah mengenal sistem kredit tradisional. Di daerah pedesaan masyarakat membutuhkan kredit karena mereka susah untuk mendapat uang tunai. *Lumbung Desa*, *Bank Desa*, dan *Bank Rakyat* adalah tiga lembaga perkreditan resmi yang bertugas melayani kebutuhan kredit masyarakat pada masa kolonial. Satu hal yang menarik adalah adanya hubungan antara perkembangan ekonomi masyarakat dan lembaga perkreditan.

**Kata kunci:** *volkscredietwezen*, kredit kecil, daerah pedesaan.

#### **Abstract**

By employing historical method, this article explains formal credit institutions in Indonesia during the Dutch colonial period especially in rural area. The study is focused on the development of three credit institutions emerging during the colonial period that operated under the *volkscredietwezen* supervision. Before the presence of *volkscredietwezen*, there had been traditional credit systems among the the society. In rural areas, the people needed loans because it was hard for them to obtain cash money. *Lumbung Desa*, *Bank Desa*, and *People Bank* constituted formal credit institutions in charge of serving the people's need of loans during the colonial period. One of the interesting things is that there was a connection between the economic development of the society and credit institutions.

**Keywords:** *volkscredietwezen*, small credit, rural area, colonial era

#### **A. Pendahuluan**

Uang merupakan penggerak utama dalam perekonomian modern. Tanpa uang ekonomi tidak akan berjalan. Oleh karena alasan itu, tidak heran ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998 pemerintah berusaha mengatasi persoalan sistem keuangan (*moneter*) melalui penyehatan lembaga perbankan di Indonesia. Puluhan bank dimasukkan dalam BPPN (*Badan Penyehatan Perbankan Nasional*)

untuk dibina dan disehatkan. Ratusan trilyun rupiah diberikan kepada bank-bank tersebut dalam skema BLBI (*Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*). Tujuannya agar lembaga perbankan di Indonesia dapat kembali sehat dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Dengan cara itu diharapkan masyarakat akan dapat memanfaatkan lembaga perbankan sebagai tempat untuk menyimpan uang sekaligus mendapatkan dana yang murah bagi ber-

bagai macam kegiatan dan usahanya. Melalui cara itu diharapkan ekonomi Indonesia cepat pulih kembali. Akan tetapi, satu realitas yang harus dihadapi adalah sebagian penerima BLBI itu tidak memanfaatkan kredit BI untuk menyehatkan bank miliknya, tetapi melarikan kredit untuk disimpan atau diinvestasikan di luar negeri. Hal yang lebih parah lagi, para penerima BLBI tidak pernah mengembalikan pinzammansya kepada pemerintah atau aset kekayaan yang diserahkan kepada pemerintah sebagai jaminan nilainya jauh di bawah kredit yang diterimanya. Dengan demikian, pemerintah telah ditipu habis-habisan dan harus menanggung beban yang besar akibat kebijakan BLBI tersebut.

Melihat keadaan tersebut wajar apabila banyak pihak yang mempertanyakan peranan pemerintah terhadap lembaga perbankan kecil/mikro. Banyak pihak yang berpandangan bahwa pemerintah kurang memberikan perhatiannya kepada lembaga perbankan kecil/mikro yang justru jumlahnya banyak dan mampu melayani masyarakat kecil dalam jumlah yang jauh lebih banyak lagi. Masyarakat pedesaan pada dasarnya sudah memiliki sistem kredit tradisional yang mampu "mencukupi" berbagai macam kebutuhan uang tunai. Meskipun demikian, kredit tradisional sering kali dianggap terlalu memberatkan debiturnya, dan lebih menguntungkan bagi krediturnya. Pihak yang menerima kredit selalu berada di posisi yang lemah, sebaliknya pemberi kredit selalu di posisi yang kuat. Hal itu muncul karena debitur kredit adalah pihak yang membutuhkan uang dibanding pemberi kredit. Hal itu sudah berjalan sejak zaman kolonial. Pada awal abad XX, pemerintah bahkan mendirikan lembaga resmi yang bertugas mengurus masalah kredit

bagi masyarakat Bumiputera. Tujuannya adalah:

1. Pengadaan kredit bersyarat lunak kepada masyarakat Bumiputera.
2. Mendorong peningkatan kegiatan produktif di kalangan masyarakat pribumi dengan jalan mengolah potensi produksi yang selama ini macet.<sup>1</sup>

Lembaga yang dikenal sebagai *Volkscredietwezen* ini didirikan atas saran residen Purwokerto De Wolff. Melalui kerja sama dengan birokrasi pemerintah lokal De Wolff berusahamendirikan lembaga perbankan untuk membantu masyarakat, khususnya para pegawai Pemerintah Kolonial. Sebagai hasilnya berdiri 19 bank perkreditan di Jawa pada tahun 1903.<sup>2</sup> Berdasar idenya itu, pemerintah kemudian menjadikan *volkcredietwezen* resmi diberi tanggungjawab terhadap perkreditan rakyat di tanah koloni pada tahun 1904. Meskipun demikian, kredit tidak resmi, yaitu kredit tradisional tetap berkembang dan hidup di kalangan masyarakat Bumiputera.

Berdasar kondisi di atas makalah sederhana ini mengkaji persoalan kredit tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat pedesaan selama periode kolonial akhir. Satu persoalan pokok yang hendak dibahas adalah bagaimana hubungan fungsional antara kredit tradisional dan campur tangan pemerintah kolonial guna menangani persoalan kredit bagi masyarakat Bumiputera. Permasalahan itu mendorong penulis untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Pertama, seperti apa sistem kredit tradisional dan bagaimana asal mula ikatan kredit itu dijalankan? Kedua, bagaimana tindakan pemerintah untuk menangani persoalan kredit bagi masyarakat Bumiputera? Terakhir apakah intervensi pemerintah kolonial memberi hasil positif

---

1 Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 350; Periksa Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen (ed), *Changing Economy in Indonesia Vol. 6, Money and Banking 1816-1940* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1980), hlm. 39; Baca juga J.T.M. van Laanen, "Di Antara De Javasche Bank dan Ceti-Ceti Cina: Perbankan dan Kredit di Indonesia pada Zaman Kolonial", dalam Anne Booth *et al.*, (ed), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 353.

2 J.C.W. Cramer, *Het volkscredietwesen in Nederlandsch Indie* (Amsterdam: H.J. Paris, 1929), hlm. 20

bagi masyarakat bumiputera pada awal abad XX?

## B. Metode

Metode dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Ada empat tahap, yaitu: pertama heuristik yaitu proses mencari dan mengumpulkan sumber, baik primer maupun sekunder yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan makalah ini.<sup>3</sup> Sumber primer didapat dari penelusuran ke berbagai perpustakaan dan lembaga yang menyimpan dokumen atau sumber yang dibutuhkan bagi makalah ini. Terdapat beberapa jenis sumber primer, pertama adalah dokumen resmi pemerintah. Berdasar isinya dapat dibagi dua, yaitu masalah perkreditan dan persoalan umum. Jenis sumber pertama ada pada *Verslag van het volkscredietwezen* yang merupakan laporan tahunan *volkscredietwezen*. Isinya tentang berbagai keterangan mengenai lembaga keuangan yang ada di bawah *volkscredietwezen*, mulai dari lumbung desa, bank desa, sampai dengan *afdelingbank* atau Bank Rakyat.

Sumber resmi pemerintah selanjutnya dalam penulisan ini adalah laporan pemerintah yang bersifat umum. Informasinya tidak hanya berisi tentang perkreditan, tetapi juga tentang berbagai macam keterangan yang bersifat umum. Sumber seperti itu adalah *Koloniaal Verslag* yang kemudian dilanjutkan *Indische Verslag* dan *Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch-Indie*. Keduanya bermanfaat untuk mengetahui masalah perkreditan secara umum selama masa kolonial. Sumber penting yang berisi berbagai macam keputusan resmi Pemerintah Kolonial ada pada *Staatsblad van Nederlandsch Indie (SNI)* yang salah satu isinya adalah berbagai macam keputusan Pemerintah Kolonial terkait dengan *volkscredietwezen* pada

umumnya, dan masalah aturan perkreditan di Indonesia pada khususnya.

Tahap kedua dalam metode sejarah adalah kritik yang dilakukan dengan memperhatikan pernyataan-pernyataan yang ada dalam sebuah sumber sejarah. Setelah melakukan heuristik dan kritik, diperoleh pemahaman tentang fakta yang ada. Pada tahap inilah interpretasi terhadap bermacam-macam fakta dilakukan sehingga dapat dilakukan klasifikasi jenis lembaga perkreditan yang ada pada masa kolonial. Tahap terakhir, yaitu historiografi atau proses menyusun data menjadi sebuah tulisan yang sistematis sehingga dapat dipahami sebagai sebuah tulisan ilmiah.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Masyarakat yang Haus Kredit

Masyarakat Jawa akhir abad XIX dan awal abad XX dikenal sebagai lapar kredit. Ada beberapa faktor yang telah membentuk masyarakat Jawa menjadi seperti itu. Faktor utamanya adalah masalah kemiskinan di kalangan masyarakat Bumiputera. Persoalan ini apabila dikaji lebih dalam lagi akan mengerucut pada beberapa hal. Masyarakat Jawa menjadi lapar kredit karena miskin. Akan tetapi apabila miskin saja tanpa faktor lainnya, mereka tidak akan membutuhkan kredit. Dengan demikian, perlu dicari masalah lainnya yang mendorong tingginya kebutuhan uang tunai di kalangan penduduk Bumiputera sehingga mereka membutuhkan banyak uang.

Sistem sosial masyarakat pedesaan menjadi salah satu pemicu tingginya kebutuhan uang tunai selama akhir abad XIX dan awal abad XX. Pada masa itu, petani dibebani berbagai macam kewajiban jika dia ingin dapat menggarap lahan sawah desa. Sebagai contoh,

3 Tentang seluk beluk metode sejarah; Periksa Gilbert J. Garraghan, *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1957), hlm. 33; Louis Gottschalk, *Mengarti Sejarah* (terjemahan Nugroho Notosusanto) (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1975), hlm. 32; Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (Jakarta: Inti Idayu, 1978), hlm.11

seorang petani harus membayar berbagai macam pajak kepada *patuh*-nya, salah satu di antaranya adalah *pacumpleng* atau semacam sewa tanah.<sup>4</sup> Meskipun besar pajak ini hanya seperenam atau sepertujuh hasil panen, tetapi jika ditambah dengan pajak-pajak dan pengeluaran lain, *pacumpleng* tetap menjadi faktor yang memberatkan kehidupan petani. Beban pajak yang ditanggung petani masa akhir abad XIX dan awal abad XX memang berat, karena di beberapa tempat ada juga pajak untuk pohon buah-buahan sebagai pengganti *pacumpleng*. Selain itu, ada juga yang disebut *pundhutan*. Pajak ini sebenarnya merupakan semacam permintaan *patuh* terhadap petani yang menggarap tanah *lungguh*-nya, saat *patuh* menyelenggarakan upacara kelahiran, khitanan, perkawinan dan kematian. Rouffaer mencatat bahwa pada tahun 1888 ada 45 jenis *pundhutan* atau *taker turun*. Di samping itu masih ada 24 macam *gawe* atau kerja wajib. Akan tetapi, pada tahun 1909 jenis pajak ini berkurang hampir separuhnya. Dalam setahun seorang sikep harus membayar pajak dua kali pasokan, yaitu setiap *Gerebeg Maulud dan Gerebeg Pasa*. Sikep yang tidak mampu membayar pajak harus mengatakan *Seleh* (menyerahkan) atau *kadhedhel* (dicabut) garapannya dan kalau perlu *katundhung* agar meninggalkan desanya.

Faktor berikutnya adalah adanya kewajiban penduduk untuk membayar pajak dalam bentuk uang tunai. Suatu hal yang tidak terjadi

pada masa sebelumnya, yang mengizinkan penduduk membayar pajak tanah dengan hasil bumi. Selain itu, adanya penghapusan wajib kerja (*heerendiensten*) dengan konsekuensi penduduk harus membayar uang kepala atau *hoofd geld* antara f.1 dan f.2 di Jawa telah menambah beban ekonomi penduduk pribumi.<sup>5</sup> Dengan cara itu, penduduk pedesaan harus membayar berbagai macam kewajibannya dengan uang tunai.<sup>6</sup> Secara keseluruhan seperlima pendapatan penduduk telah habis hanya untuk membayar pajak kepada pemerintah.<sup>7</sup>

Tingginya beban pajak yang ditanggung oleh penduduk pribumi, terutama di P. Jawa, disebabkan kebijakan perpajakan Pemerintah Kolonial yang sangat memberatkan penduduk P. Jawa sebagai kelompok masyarakat terbesar di Indonesia. Mereka merupakan golongan masyarakat yang menanggung pajak, sedangkan orang-orang Barat, dan penduduk di luar P. Jawa dan Timur Asing sama sekali tidak ikut menanggung beban pajak. Saat itu pemerintah lebih memfokuskan untuk menarik pajak tanah, sedangkan pajak penghasilan atau *bedrijfsbelasting* baru dipungut pada tahun 1907 kepada penduduk pribumi di Jawa dan luar Jawa serta terhadap warga Timur Asing.<sup>8</sup> Dengan demikian, selama abad XIX penghasilan pemerintah yang berasal dari pajak sebagian besar disumbang oleh penduduk Jawa yang kondisi ekonominya tidak lebih baik, kalau tidak mau dikatakan

4 Suhartono, 1991, op. cit., hlm. 39. Lihat juga; Van Deventer, *Bijdragen tot de Kennis van het Landelijk Stelsel op Java, Jilid I-III* (Zalt-Bommel: Joh Norman & Zoon, 1885-1865), hlm. 177-179.

5 Suhartono, 1991, op. cit., hlm. 39. Lihat juga; Van Deventer, *Bijdragen tot de Kennis van het Landelijk Stelsel op Java, Jilid I-III* (Zalt-Bommel: Joh Norman & Zoon, 1885-1865), hlm. 13.

6 Berkaitan dengan beban pajak yang tinggi itu, *Mindere Welvaarts Commissie* menyebutkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga di Jawa berkisar f.80 setahunnya. Sedangkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah kurang lebih f. 16 setahun. Lebih jelas baca: F.A. Sutjipto (ed), *Sejarah Nasional Indonesia IV* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hlm. 102.

7 Berdasarkan laporan dari pejabat di daerah dilaporkan bahwa pajak tanah mengalami kenaikan selama dekade pertama abad XX. Lebih jelas baca arsip *MVO Residen Banten* tahun 1913 koleksi Arnas.

8 G. Gonggrijp, *Schets Eener Economische Geschiedenis van Nederlandsche-Indie* (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1928), hlm. 208-209. Beban penduduk P. Jawa semakin berat karena kebijakan Pemerintah kolonial yang sangat merugikan penduduk P. Jawa pada saat itu. Selama abad XIX penduduk P. Jawa harus menanggung akibat dari politik *burden of empire* yang dianut pemerintah. Dalam sistem politik itu penduduk P. Jawa harus menanggung beban finansial bagi daerah-daerah yang lainnya di Indonesia yang dikuasai oleh Belanda.



lebih buruk dibandingkan dengan orang-orang Barat atau Timur Asing.

Selain itu, sistem pajak yang dianut oleh Pemerintah Kolonial selama periode itu juga memberikan beban tambahan bagi penduduk pribumi. Pemerintah Kolonial memberlakukan sistem pajak progresif di Indonesia. Dalam sistem perpajakan tersebut, penduduk pribumi merupakan golongan penduduk yang menanggung prosentase pajak yang tinggi bagi Pemerintah Kolonial selama abad XIX. Kondisi yang sebaliknya dialami oleh perusahaan perkebunan yang banyak beroperasi dan memperoleh keuntungan di Indonesia. Oleh karena tingginya pendapatannya, mereka hanya menanggung prosentase pajak yang rendah.<sup>9</sup>

Faktor ketiga berkaitan dengan pendapatan penduduk desa yang bersifat periodik menyebabkan mereka rentan “guncangan” secara ekonomis. Kondisi itu menyebabkan petani seringkali mengalami kesukaran berkaitan dengan masalah keuangan.<sup>10</sup> Akibatnya, mereka itu tidak mempunyai tabungan baik berupa uang tunai maupun sisa hasil panen yang lalu. Kondisi itu menyebabkan mereka seringkali mengalami kesulitan apabila terjadi berbagai masalah yang sebelumnya tidak diperkirakan, misalnya bencana alam, gagal panen, dan wabah penyakit.

Permasalahan penduduk desa sehubungan dengan masalah keuangan semakin bertambah berat akibat kebiasaan hidup mereka yang cenderung boros dan kurang mampu mengatur keuangannya.<sup>11</sup> Adanya berbagai macam upacara kehidupan dan kewajiban komunal lainnya telah menyebabkan masyarakat pedesaan harus mengeluarkan banyak uang untuk membiayai semuanya itu. Faktor terakhir inilah yang dianggap sebagai penyebab utama terjadinya kekurangan uang di kalangan masyarakat Pribumi selama awal periode abad XX.<sup>12</sup> Hal yang lebih menyedihkan lagi, berbagai macam upacara itu tidak mampu dielakkan petani, karena adanya sanksi sosial dalam masyarakat.<sup>13</sup> Satu faktor lagi yang menambah beban hidup masyarakat pribumi adalah menurunnya pendapatan penduduk yang diperoleh dari perusahaan perkebunan, baik berupa upah kerja, uang sewa tanah, dan penyerahan hasil tanaman.<sup>14</sup> Selain itu, masuknya barang impor juga telah menyebabkan pendapatan penduduk pribumi semakin menurun, karena orang lebih suka menggunakan karung yang diimpor dari Benggala dibandingkan dengan tikar dan keranjang. Perusahaan perkebunan sebanyak mungkin menghindari penggunaan pedati sebagai alat angkut tebu perkebunan. Mereka lebih memilih membangun jalan-jalan

- 9 Berkaitan dengan beban pajak yang tinggi itu, *Mindere Welvaarts Commissie* menyebutkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga di Jawa berkisar f.80 setahunnya. Sedangkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah kurang lebih f. 16 setahun. Lebih jelas baca: F.A. Sutjipto (ed), *Sejarah Nasional Indonesia IV* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hlm. 103.
- 10 D.H. Burger, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia II* (Jakarta: Pradnja Paramita, 1972), hlm. 120.
- 11 Pandu Suharto, *Sejarah Pendirian Bank Perkreditan Rakyat* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1988), hlm. 12.
- 12 C.L. Loriaux dan C.L. van Dorn, 1924, “Economic Beschrijving van de Desa Wiroen (Regentschap Koeto-Ardjo) in Betrekking tot de Credietverhouding onder de Bewoners”, dalam *Blaadje van Volkscredietwezen 1924*, hlm. 21.
- 13 Burger, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia II* (Jakarta: Pradnja Paramita, 1972), hlm. 121; lebih lanjut dikatakan bahwa kewajiban sosial petani menjadi salah satu sebab utama timbulnya utang di kalangan penduduk desa di Jawa.
- 14 Kondisi itu disebabkan oleh terjadinya krisis gula pada tahun 1884 yang terus berlanjut hingga tahun 1895 dan berjangkitnya penyakit sereh pada tanaman tebu. Pada tahun 1884 dan sebelumnya tanah-tanah yang ditanami tebu seluas 60.000 bahu. Sedangkan jumlah uang yang dibayarkan keseluruhannya sebesar f. 30 juta, jadi kira-kira f.500/bahu. Dalam tahun 1903 areal penanaman tebu mencapai 114.500 bahu. Sedangkan jumlah uang yang dibayarkan kepada rakyat sebesar f. 35 juta. Jadi apabila dirata-ratakan per-bahunya sebesar f. 307. Lebih jelas baca: G. Gonggrijp, *Schets Eener Ekonomische Geschiedenis van Nederlandsche-Indie* (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1928), hlm. 186-188.

lori yang mudah dipindahkan sebagai sarana pengakutan hasil perkebunan. Berdasarkan kondisi di atas dapat diketahui telah terjadi penurunan tingkat kesejahteraan penduduk Pribumi.<sup>15</sup> Dengan kata lain, telah terjadi kemiskinan di kalangan masyarakat pribumi, khususnya penduduk P. Jawa.

Satu faktor yang semakin menambah beban penderitaan masyarakat pedesaan adalah adanya perubahan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial pada tahun 1877.<sup>16</sup> Kebijakan Pemerintah Kolonial untuk melakukan depresiasi terhadap mata uang yang digunakan oleh penduduk P. Jawa telah menyebabkan upah riil kaum buruh semakin menurun nilainya. Akibatnya ketika pendapatan petani semakin berkurang, harga barang justru semakin meningkat.

Dengan kata lain, dengan pendapatan yang sama dibandingkan periode sebelumnya petani tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, karena meningkatnya harga barang. Jadi terjadi kondisi yang sangat ironis bagi masyarakat pedesaan. Pendapatan mengalami penurunan, sedangkan harga barang justru semakin mahal. Kondisi itu selain menyebabkan kemiskinan juga ber-

akibat tingginya kebutuhan uang tunai di kalangan masyarakat pedesaan P. Jawa selama masa akhir abad XIX. Pendapatan mereka tidak mencukupi kebutuhan hariannya. Oleh karena itu, sangat wajar jika muncul pendapat bahwa masyarakat lapar kredit.

Tingginya kebutuhan uang tunai di kalangan masyarakat Bumiputera secara tidak langsung menyebabkan munculnya pengaruh sampingan, yaitu bunga kredit yang harus ditanggung debitur meningkat. Saat itu bunga yang harus ditanggung pihak debitur, dalam hal ini adalah penduduk desa dan mereka yang menerima utang berada dalam kisaran di atas 30% per-tahun. Apabila utang-piutang itu melibatkan hubungan kerja antara produsen dan atau petani bunganya meningkat lagi menjadi di atas kisaran 36% per-tahun. Pemerintah Kolonial sendiri telah menentukan bunga yang harus ditanggung debitur dalam hubungan utang-piutang di Indonesia melalui *Staatsblad* 1880 no 83. Tabel di bawah ini memberikan penjelasan tentang jumlah pinzaman, besarnya bunga, dan batas pelunasan serta prosentase bunga yang harus dibayar penerima utang.

Tabel 1. Besar Kredit dan Bunga Kredit

| Jumlah Pinzaman    | Besar Bunga | Batas Pelunasan dan Prosentase Bunga |
|--------------------|-------------|--------------------------------------|
| 20 sen atau kurang | ½ sen       | 3 bulan atau 90%/tahun               |
| 20-40 sen          | 1           | Idem                                 |
| 40-60 sen          | 1,5 sen     | Idem                                 |
| 60-80 sen          | 2 sen       | Idem                                 |
| 80-100 sen         | 2,5 sen     | Idem                                 |
| f.1-f.25           | 6%/bulan    | 3 bulan atau 72%/tahun               |
| f.25-f.50          | 5%/bulan    | 6 bulan atau 60%/tahun               |
| f.50-f.75          | 4%/bulan    | 9 bulan atau 48%/tahun               |
| f.75-f.100         | 3%/bulan    | 12 bulan atau 36%/tahun              |

Sumber: *Tijdschrift van Nederlandsch-Indie II*, 1898.

15 Indikasi merosotnya tingkat kesejahteraan penduduk dapat diketahui dari rendahnya nilai barang yang dijadikan jaminan ikatan kredit. Kondisi itu semakin bertambah parah, karena taksiran nilai barang yang dijadikan jaminan juga sangat rendah. Semakin bertambah lagi karena kredit yang diperoleh biasanya hanya setengah atau dua-partiga dari nilai taksiran barang yang dijaminan tersebut. Lebih jauh baca: Anonim, "De Oprichting van de Eerste Hulp en Spaarbank Door Inlandsche Hoofden te Poewokerto", dalam *Tijdschrift van Nederlandsch-Indie II*, 1898, hlm. 361.

16 Pada tahun 1877 Pemerintah Hindia Belanda beralih menggunakan standar emas dalam sistem moneterinya. Lebih jelas baca; G. Gonggrijp, *Schets Eener Economische Geschiedenis van Nederlandsche-Indie* (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1928), hlm. 191.

Berdasarkan angka-angka pada tabel di atas, bunga yang harus ditanggung debitur atau orang yang menanggung hutang sangat tinggi. Paling rendah bunga yang harus dibayar seorang debitur pada tabel di atas adalah 36%/tahun atau 3%/bulan. Keadaan itu tentu saja sangat memberatkan debiturnya. Dengan demikian tidak salah apabila ada ungkapan yang menyebutkan bahwa petani hidup dalam kungkungan hutang. Beban bunga yang tinggi jelas telah menjerat petani jatuh ke dalam kemelaratan. Akan tetapi, apabila diperhatikan lebih jelas lagi yang menanggung hutang pada masa itu bukan saja petani tetapi juga kelompok masyarakat lainnya.<sup>17</sup> Keadaan itu sesungguhnya merefleksikan suatu kondisi bahwa uang tunai sangat "mahal" saat itu. Dengan kata lain, telah terjadi kesulitan ekonomi di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pribumi.

Dalam realitanya bunga yang harus ditanggung pihak debitur semakin tinggi apabila utang-piutang itu menyangkut masalah hasil pertanian. Dalam hal ini pihak kreditur tidak pernah menggunakan patokan yang tetap ketika menetapkan dasar harga atas barang yang ditanggung pihak debitur. Semuanya sangat memberatkan pihak debitur, dan tentu saja sangat menguntungkan pihak kreditur. Berdasarkan kondisi di atas sangat masuk akal pendapat yang menyebutkan bahwa orang yang berhutang tidak pernah bebas dari pinzamanannya sedangkan pemberi pinzaman semakin kaya melalui bunga yang mereka pungut tidaklah salah.<sup>18</sup>

## 2. Kredit Tradisional di Indonesia

Masalah hubungan kredit atau simpan pinjam di Indonesia bukan sesuatu yang baru. Dalam masyarakat tradisional hubungan semacam itu muncul bukan saja dalam bidang

perdagangan tetapi juga dalam masalah pengolahan tanah. Dengan kata lain, di sektor pertanian terjadi hubungan kredit antara penggarap dan pemilik tanah. Hubungan itu ada karena terjadi sistem bagi hasil dalam pengolahan tanah. Melalui hubungan itu, pemilik tanah, selain menyerahkan sebagian atau seluruh tanahnya seringkali juga menyerahkan sebagian atau seluruh modal untuk usaha pengolahan tanah tersebut. Hal itu dilakukan dalam bentuk *innatura*: benih, ternak dan alat-alat, atau dalam bentuk persekot yang dapat memengaruhi persyaratan bagi hasil. Dengan demikian, terjadi gabungan usaha bagi hasil dan usaha perkreditan. Perjanjian itu biasanya dibuat untuk dua atau tiga tahun atau lebih. Sesungguhnya perjanjian itu mirip sekali dengan pembelian sebagian dari hasil panen yang belum pasti dengan pembayaran di muka. Hubungan kerja sama seperti itu dilakukan karena sejak 1808 di Jawa sudah dilarang untuk melakukan perdagangan sistem *ijon*.

Sistem *ijon* di Pantai Utara Jawa berlaku sebagai berikut; seorang petani misalnya memiliki sebidang sawah seluas setengah bau, yang hasilnya ditaksir sebanyak 15 pikul. Segera setelah padi ditanam, dia menerima misalnya f. 1,5/pikul. Jadi secara keseluruhan petani mendapatkan f. 22,5 dari pihak rentenir yang sekarang bertindak sebagai pemborong hasil pertanian. Sebagai konsekuensinya, dia harus menyerahkan 15 pikul padi setelah panen. Apabila si petani tidak mampu memenuhi kewajibannya setiap pikul kekurangannya dia harus menyerahkan dua pikul padi pada panen berikutnya. Jadi dasar perjanjian ini ialah bahwa untuk sejumlah gulden tertentu pada waktu panen harus diserahkan padi sebanyak yang sudah ditentukan sebelumnya. Keadaan itu berarti pihak pelepas uang atau rentenir mendapatkan bunga yang tinggi.<sup>19</sup>

17 Di Indonesia pada masa itu kondisi lapar kredit juga dialami oleh kaum bangsawan. Mereka itu terlibat banyak utang-piutang kepada para rentenir. Lebih jelas lagi baca; Twang Peck Yang, *Elit Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950* (Yogyakarta: Niagra, 2004), hlm. 68.

18 G. Gonggrijp, *Schets Eener Ekonomische Geschiedenis van Nederlandsche-Indie* (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1928).

19 A.M.P.A. Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 319-321.

Pada kenyataannya, akibat perjanjian ijon dan perjanjian sewa yang digabungkan dengan bagi hasil, petani harus menyerahkan sejumlah hasil panen kepada pemberi uang. Perbedaannya hanyalah dalam hal sewa tanah yang digabungkan dengan bagi hasil, pelepas uang tidak menerima kembali uangnya, tetapi dia menerima sejumlah uang hasil tanaman. Pihak rentenir ikut menanggung risiko dan menerima sebagian dari hasil panen.

Hubungan kredit lainnya yang berkembang dari hubungan sewa tanah adalah semacam sistem gadai tanah. Hubungan itu terjadiketikapemberigadaimenerimasejumlah uang dari penerima gadai, sebaliknya dia harus menyerahkan sebidang tanah miliknya kepada penerima gadai untuk pemakaian sedemikian rupa, sehingga penerima itu dapat dibagikan kembali kepada yang menggadaikannya. Cara penanaman modal ini digemari banyak orang. Si penggadai kemudian membayar bunga dalam bentuk bagian yang seimbang dengan hasil panen, sementara dia semata-mata mengutus usaha penanamannya.

Jenis hubungan perkreditan lainnya berasal dari hubungan perdagangan atau jual beli di kalangan masyarakat pribumi, khususnya yang biasa disebut sebagai mindering. Istilah mindering sendiri berasal dari Bahasa Belanda *minding* yang artinya pengurangan.<sup>20</sup> Kata ini kemudian diterjemahkan oleh masyarakat Jawa *mindring* yang artinya pembayaran sebagian atau mengurangi utang awal. Bisa juga diartikan dengan ide dari pembayaran secara bertahap.<sup>21</sup> Sistem kredit secara mindering bertumpu pada angsuran berkala, yang atas pelunasannya boleh dikatakan cukup pendek. Jadi jumlah yang dipinjam dibayar secara cicilan baik harian, mingguan atau

bulanan.<sup>22</sup> Kredit ini sebagian besar dilakukan oleh Orang Cina. Mereka berkeliling di daerah pedesaan, kadang-kadang disertai pula dengan barang dagangan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain orang Cina, kredit ini juga diusahakan oleh Orang Arab, India, dan sebagian penduduk pribumi. Mindering ini banyak diketemukan di daerah Vorstenlanden, Magelang, Pasuruan, Madiun, Besuki, Kediri, Semarang, dan Priangan. Menurut Gutem pada dekade kedua abad XX di daerah sebelah barat Priangan belum ada minderingan.<sup>23</sup> Dengan demikian, nyaris di setiap tempat di Jawa dapat diketemukan praktik perdagangan dengan sistem minderingan ini. Sistem minderingan ini ada di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, sebaliknya tidak diketemukan di Jawa Barat bagian barat dan utara.

Munculnya mindering di pedesaan Jawa erat hubungannya dengan munculnya pedagang keliling Cina yang sering disebut sebagai pedagang kelonthong, karena mereka menggunakan alat yang apabila dibunyikan akan berbunyi *thong-thong*. Pedagang kelonthong ini biasanya menjajakan barang ke desa-desa terpencil untuk menawarkan barang dagangannya kepada penduduk. Perdagangan kelonthong itu biasanya dilakukan dengan cara memberikan kredit atau pinjaman kepada para pembelinya. Selain itu, para pedagang itu juga memberikan kredit dalam bentuk uang tunai kepada para penduduk pedesaan.<sup>24</sup> Biasanya para mindering ini, pada awalnya bergerak dalam perdagangan barang. Baru setelah mereka mendapatkan keuntungan, mereka masuk ke mindering uang. Dengan demikian penjualan barang secara kecil-kecilan merupakan jembatan untuk perdagangan riba.<sup>25</sup>

20 Lebih jelas periksa; S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Jakarta: Icthiar Baru- van Hoeve, 1995).

21 V.B. van Gutem, "Tjina Mindering", dalam *Koloniale Studien, 1918*, hlm. 109.

22 Ida Yulianti, "Mindering di Pedesaan Jawa Pada Masa Awal Abad ke-20 (1901-1930)", *Lembaran Sejarah, Volume 2, No. 1* (Yogyakarta: Jurusan sejarah Fakultas Sastra UGM, 1999), hlm. 10.

23 V.B. van Gutem, "Tjina Mindering", dalam *Koloniale Studien, 1918*, hlm. 114.

24 Ong Eng Die, "Peranan Orang Tionghoa dalam Perdagangan", dalam Mely G. Tan (ed), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 45.



Minding yang berupa barang disebut mindingan barang. Objek transaksinya meliputi barang-barang peralatan rumah tangga, misalnya piring, baju, dan celana yang dijual secara kredit. Transaksi minding berjalan tanpa melalui prosedur yang berbelit-belit. Penjual bertemu secara langsung dengan pembelinya. Transaksi itu berjalan tanpa melalui surat perjanjian atau saksi. Meskipun demikian, tukang minding memiliki catatan daftar pembeli untuk setiap daerah kerjanya.

Melalui sistem minding ini, pihak penjual atau pemberi kredit mampu mempercepat penjualan barang-barang dagangannya. Hal itu disebabkan pembayaran barang dapat diangsur selama 10 kali dengan sistem *minggon* (per-minggu). Apabila diperhitungkan bunga yang dikenakan kepada pembelinya, bunga itu berkisar antara 5,4% hingga 6,7%/minggu. Sedangkan risiko bagi tukang minding kurang lebih 9% modalnya tidak kembali. Hal itu berarti hilang di peredaran. Daerah kerja tukang minding rata-rata meliputi 5-6 desa. Pada umumnya telah ada persetujuan pembagian daerah kerja di antara para tukang minding.<sup>26</sup> Dengan cara itu, mereka dapat mengurangi persaingan di antara mereka sendiri, sehingga keuntungan yang diraih dapat meningkat.

Mindingan barang risikonya lebih rendah dibandingkan dengan mindingan uang. Hal itu disebabkan mindingan barang akan menerima uang secara langsung. Sedangkan kekurangan sisa pembayarannya dibayar secara angsuran. Yang dengan kata

lain, dalam sistem mindingan barang sesungguhnya yang dikredit adalah kekurangan harga barang. Atau dengan kata lain, dalam sistem mindingan barang, pihak pembeli terlebih dahulu harus membayar uang muka sebelum dapat memperoleh kredit atau pinjaman dari pihak penjual dalam hal ini para tukang minding. Mindingan barang memungkinkan orang Cina lebih banyak berinteraksi dengan penduduk pedesaan, melalui penawaran barang dagangan. Sistem minding ini digemari dan berjalan dengan baik karena mempunyai tiga kelebihan, yaitu kalkulasi sederhana dan fleksibel, profesionalisme dan kerajinan para pelakunya, yaitu para pedagang minding yang berjalan dari satu desa ke desa lainnya, setiap harinya untuk menjajakan barang sekaligus menarik tagihan dari para pelanggannya.

Mindingan uang, prosedurnya sama dengan mindingan barang. Pihak konsumen meminjam uang dan pembayaran kembali akan dilakukan dengan cara angsuran ditambah bunga pinzamannya. Para pemberi kredit atau pinjaman ini, biasanya Orang Cina. Mereka ini biasanya hanya meminjamkan sejumlah kecil uang kepada masyarakat terutama pedagang kecil dan istri petani.<sup>27</sup> Tindakan ini diambil karena risiko yang harus ditanggung lebih besar dibandingkan dengan mindingan barang.

### 1. *Volkscredietwezen*

Kebijakan kredit kecil pemerintah pada masa kolonial dimulai pada tahun

25 Ida Yulianti, "Minding di Pedesaan Jawa Pada Masa Awal Abad ke-20 (1901-1930)", *Lembaran Sejarah, Volume 2, No. 1* (Yogyakarta: Jurusan sejarah Fakultas Sastra UGM, 1999), hlm. 10.

26 Suproyo et al., *Masalah Sistem Perkreditan Tradisional di Daerah Pedesaan* (Yogyakarta: Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan, Tanpa Tahun), hlm. 52.

27 Jan T.M. van Laanen, "Di antara De Javasche Bank dan Ceti-Ceti Cina: Perbankan dan Kredit pada Zaman Kolonial", dalam Anne Booth, *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 352. <?> Jan T. van Laanen, "Di antara De Javasche Bank dan Ceti-Ceti Cina: Perbankan dan Kredit di Indonesia Pada Zaman Kolonial", dalam Anne Booth et al., (ed) *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 353. Sebelumnya terdapat banyak sumber informal bagi kebutuhan kredit masyarakat Jawa yang pada masa itu dikatakan sebagai "lapar" kredit. Lebih jelas baca: D.H. Burger, *Sejarah Ekonomis Sosiologis II* (Jakarta: Pradnja Paramita, 1970), hlm. 120-121. Kondisi lapar kredit di Jawa sesungguhnya tidak hanya terjadi pada kaum petani kecil, tetapi juga melanda kaum bangsawan. Mereka itu banyak terlibat utang-piutang dengan para rentenir. Lebih jelas lagi baca: Twang Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950* (Yogyakarta: Niagra, 2004), hlm. 68.

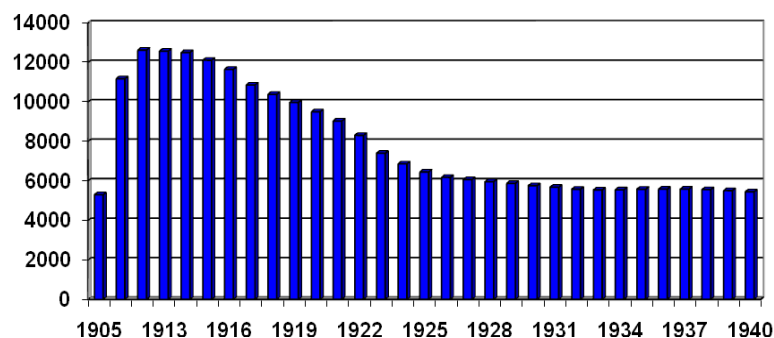
1904, ketika *Volkscredietwezen* ditetapkan bertanggungjawab secara resmi terhadap pengadaan kredit bagi masyarakat pribumi.<sup>28</sup> Dengan keberadaan lembaga-lembaga perkreditan di bawah *Volkscredietwezen*, seperti Lumbung Desa, Bank Desa dan *Afdelingbank*,<sup>29</sup> penduduk bumiputera mendapat kesempatan meminjam uang dengan bunga rendah untuk kesempatan berusaha dan lapangan kerja.<sup>30</sup> Terdapat dua tugas utama dari lembaga tersebut. Pertama di bidang ekonomi, yaitu sebagai penyedia kredit dengan bunga rendah bagi masyarakat bumiputera. Kedua, tugas sosial, yaitu membantu masyarakat bumiputera mendapatkan kesempatan kerja. Dua tugas itu sesuai dengan situasi sosial ekonomi masyarakat bumiputera yang saat itu sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

Lembaga pertama yang ada dalam naungan *Volkscredietwezen* adalah Lumbung Desa. Pada awalnya Lumbung Desa menjadi lembaga perkreditan yang dikedepankan pemerintah. Pertumbuhan Lumbung Desa dirangsang, sehingga pendiriannya dilakukan

atas prakarsa dan keinginan para pegawai pemerintah. Sebagai akibatnya, Lumbung Desa berkembang pesat selama dekade pertama abad XX. Hampir di setiap tempat di Pulau Jawa berdiri Lumbung Desa. Di luar Jawa, Lumbung Desa dilaporkan berkembang di beberapa tempat seperti di Aceh, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Dalam waktu enam tahun, jumlah Lumbung Desa berkembang pesat lebih dari 2 kali lipat. Pada tahun 1905, tercatat ada sebanyak 5.301 buah Lumbung Desa. Angka itu kemudian meningkat menjadi 12.625 di tahun 1911.

Perkembangan jumlah Lumbung Desa yang cepat itu membawa dampak yang negatif, karena banyak lumbung yang didirikan secara tergesa-gesa dan tanpa perencanaan yang matang. Pada akhirnya, banyak lumbung yang terpaksa ditutup pemerintah karena dianggap tidak memberi manfaat bagi masyarakat pedesaan. Meskipun demikian, masih tersisa lebih dari 5.000 buah lumbung pada dekade 1930-an. Lebih jelas lagi mengenai perkembangan jumlah Lumbung Desa dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.1. Jumlah Lumbung Desa Periode 1905-1940



Sumber: *Koloniaal Verslag, Indisch Verslag II: Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch-Indie* dan *Statistical Pocket Book of Indonesia 1941*

- 28 Jan T. van Laanen, "Di antara De Javasche Bank dan Ceti-Ceti Cina: Perbankan dan Kredit di Indonesia Pada Zaman Kolonial", dalam Anne Booth et al., (ed) *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 353. Sebelumnya terdapat banyak sumber informal bagi kebutuhan kredit masyarakat Jawa yang pada masa itu dikatakan sebagai "lapar" kredit. Lebih jelas baca: D.H. Burger, *Sejarah Ekonomis Sosiologis II* (Jakarta: Pradnja Paramita, 1970), hlm. 120-121. Kondisi lapar kredit di Jawa sesungguhnya tidak hanya terjadi pada kaum petani kecil, tetapi juga melanda kaum bangsawan. Mereka itu banyak terlibat utang-piutang dengan para rentenir. Lebih jelas lagi baca: Twang Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950* (Yogyakarta: Niagra, 2004), hlm. 68.
- 29 Anne Booth, *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries, A History of Missed Opportunities* (London: Macmillan Press Ltd), hlm. 303.
- 30 D.G. Stibbe (ed), *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie* ('s Gravenhage: M. Nijhoff, 1921), hlm. 605.

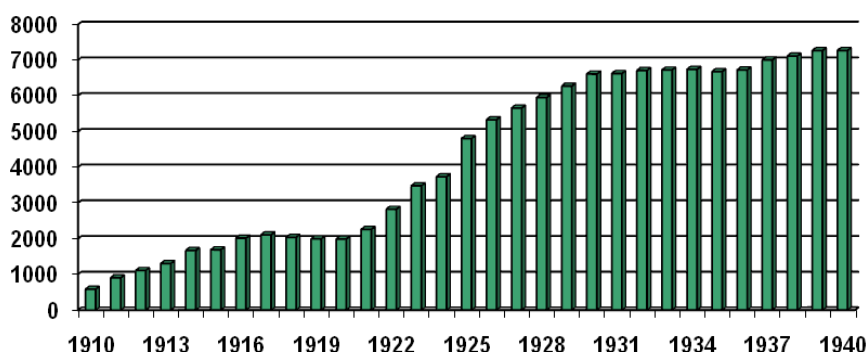
Lembaga kedua dalam *Volkscredietwezen* adalah Bank Desa. Pada awalnya, pemerintah kurang memberi perhatian kepada lembaga ini. Pemerintah kemudian mencoba mendirikan bank desa. Berbeda dengan Lumbung Desa yang dikembangkan secara cepat, Bank Desa dikembangkan dengan lebih hati-hati. Pemerintah menyadari bahwa bank desa hanya dapat berkembang dengan baik apabila dibangun hanya demi kepentingan penduduk desa yang bersangkutan. Dalam pandangan pemerintah, bank desa dapat berdiri dan bekerja dengan baik apabila penduduk di lingkungannya membutuhkan keberadaannya.<sup>31</sup>

Sikap hati-hati pemerintah dalam pengembangan bank desa berpengaruh terhadap perkembangan jumlahnya. Pada awal perkembangan bank desa, jumlahnya tidak sebanyak lumbung desa. Pada tahun 1907 baru tercatat 328 bank desa. Jumlah itu kemudian meningkat menjadi 906 di tahun 1911, hal yang menarik dari jumlah itu 904 di antaranya ada di Pulau Jawa.<sup>32</sup> Keadaan itu disebabkan pemerintah menuntut syarat ketat guna mendirikan bank desa. Tindakan itu diambil agar pemerintah dapat mengawasi bank desa,

sehingga tidak terjadi penyelewengan seperti yang terjadi pada lumbung desa.<sup>33</sup> Walaupun perkembangannya lambat, secara umum jumlah bank desa terus bertambah, meskipun di beberapa daerah terjadi penutupan atau penggabungan beberapa bank desa.

Jumlah bank desa bertambah banyak memasuki periode 1920-an. Saat itu, Pemerintah Kolonial memberi tugas kepada aparat Bumiputera untuk mendirikan bank desa. Tugas birokrasi desa kemudian dipertegas dengan keluarnya surat edaran pemerintah tanggal 11 Oktober 1922 No. 2829/III. Dalam surat edaran itu, disebutkan bahwa pemerintah akan memberi perhatian kepada bank desa. Apabila ada bank desa yang terbukti tidak berkembang akan dilikuidasi, sebaliknya yang perkembangannya bagus akan diperluas usahanya. Gubernur Jendral selanjutnya menekankan kepada penguasa daerah untuk bekerja sama dalam mendirikan bank desa. Pendiriannya bukan saja dilakukan dengan melikuidasi lumbung desa yang ada, tetapi juga dengan mengurangi usaha *afdelingsbank* pada bidang kredit kecil.<sup>34</sup> Lebih jelas lagi mengenai perkembangan Bank Desa dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.3 Perkembangan Jumlah Bank Desa Periode 1910-1940



Sumber: *Koloniaal dan Indisch Verslag* Sesuai dengan angka tahun

31 MVO Residen Banten van Riensum 1913, Reel 1 Jo. 1a Koleksi MVO Arnas RI.

32 Pandu Suharto, *Sejarah Pendirian Bank Perkreditan Rakyat* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1988), hlm. 99.

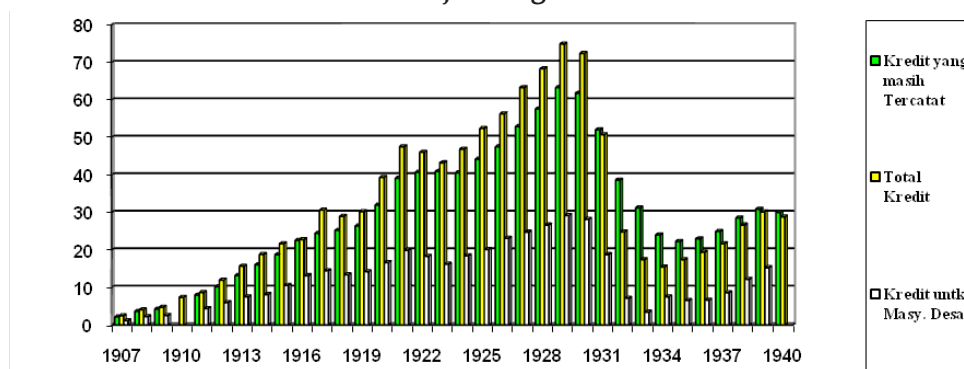
33 Haryono Rinardi, *Kredit Untuk Rakyat: Kebijakan Kredit Kecil Perbankan Untuk Usaha Kecil dan Menengah 1904-1990* (Yogyakarta: Disertasi S-3 tidak diterbitkan), hlm. 117. Lebih jelas, baca; *Verslag van het volkscredietwesen over het jaar 1920*, hlm. 10.

34 Margono, "De toekomst van het desabankwezen op Java en Madura", dalam *Blaadje voor het Volkscredietwezen* No. 11, 15 Nopember 1924, hlm. 78.

Lembaga perkreditan ketiga adalah Lembaga perkreditan lainnya, yang ada di bawah naungan *Volkscredietweseen* adalah *Afdelingbank* yang disebut juga *Volksbank* atau Bank Rakyat, karena melayani segala lapisan masyarakat, termasuk petani. Dalam perkembangannya namanya lebih dikenal dengan nama bank setempat karena bertindak sebagai bank tunggal di daerah itu.<sup>35</sup> Kemampuan *Afdelingbank* untuk menyalurkan kredit kepada nasabahnya sangat bagus, karena jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya, kecuali pada periode depresi ekonomi. Mengenai hal itu dapat dilihat pada grafik 2.10, yang juga memberikan gambaran tentang jumlah kredit yang masih tercatat dan jumlah kredit kepada penduduk pedesaan.

Secara keseluruhan akibat depresi ekonomi, *Afdelingbank* mengalami kemunduran dalam penyediaan kredit kepada masyarakat. Titik terendahnya terjadi di tahun 1934, saat itu *Afdelingbank* hanya mampu menyalurkan kredit sebesar f. 15,46 juta.<sup>36</sup> Hal itu berarti terjadi penurunan tajam, karena pada tahun 1929 *Afdelingbank* berhasil memberi pinjaman kepada nasabahnya sebanyak f. 74,87 juta.<sup>37</sup> Dengan demikian, jumlah kredit yang disalurkan *Afdelingbank* kepada nasabahnya saat itu hanya sebesar kurang dari 20% dibandingkan tahun 1929, yaitu masa puncak keberhasilan *Afdelingbank* untuk menyalurkan kredit.

Grafik 3.3. Kinerja *Afdelingbank* terkait modal dan jumlah kredit 1907-1940 (dalam jutaan gulden)



Sumber diolah dari: C E I Vol. VI *Money and Banking 1816-1940*

Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa *Afdelingbank* mengalami dua kali periode penurunan kredit, yaitu pada masa Perang Dunia (PD) I dan masa depresi ekonomi 1929. Selama berkecamuk PD I *Afdelingbank* hanya sekali mengalami penurunan kredit, yaitu tahun 1917. Sementara dalam periode depresi, jumlah kredit yang dipinjamkan *Afdelingbank* turun selama periode 1930 sampai 1934.

#### D. Simpulan

Terdapat 3 lembaga perkreditan resmi selama masa kolonial di Indonesia. Pertama adalah; Lumbung Desa, Bank Desa, dan terakhir Afdelingsbank. ketiga lembaga perkreditan itu ada di bawah naungan *Volkscredietweseen*. Pendirian ketiga lembaga perkreditan itu merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang banyak melanda

35 Apabila bank rakyat ada di Semarang, lebih dikenal sebagai Bank Semarang. Lebih jelas baca; Humas BRI, 1995, Pandu Suharto, *Sejarah Pendirian Bank Perkreditan Rakyat* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1988), hlm. 9- 10.

36 Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen (ed), *Changing Economy in Indonesia Vol. 6, Money and Banking 1816-1940* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1980), hlm. 110.

37 Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen (ed), *Changing Economy in Indonesia Vol. 6, Money and Banking 1816-1940* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1980), hlm. 111.

masyarakat pedesaan. Pemerintah Kolonial beranggapan salah satu penyebab kemiskinan adalah tidak ada lembaga perkreditan yang sanggup menyediakan kredit bagi petani. Ikatan kredit tradisional yang sebelumnya berlaku dianggap Pemerintah Kolonial membebani petani sebagai penerima kredit, karena syarat dan bunga kreditnya tinggi.

Lembaga perkreditan berkembang karena didorong oleh Pemerintah Kolonial. Melalui lembaga perkreditan itu, pemerintah berharap dapat membantu mengatasi kemiskinan yang melanda wilayah pedesaan. Dengan Lumbung Desa, Pemerintah Kolonial berharap dapat membantu petani mengatasi gejolak harga yang selalu merugikan. Hasil panen petani dapat disimpan di Lumbung Desa lebih dahulu menunggu harga padi meningkat. Dengan cara itu, hasil panen petani tidak dijual dengan harga murah yang akan sangat merugikan mereka. Bank Desa didirikan Pemerintah Kolonial dengan harapan dapat menyediakan uang tunai dengan bunga rendah kepada petani. Afdelingsbank didirikan dengan tujuan membantu menyediakan uang tunai kepada masyarakat maupun lembaga perkreditan yang ada di tingkat pedesaan.

### Daftar Pustaka

- Anonim. 1898. "De Oprichting van de Eerste Hulp en Spaarbank Door Inlandsche Hoofden te Poewokerto," dalam *Tijdschrift van Nederlandsch-Indie II*.
- Arsip Nasional. 1913. *MVO Residen Banten van Riensum 1913*, Reel 1 Jo. 1a Koleksi MVO Arnas RI.
- Arsip. 1913. *MVO Residen Banten tahun 1913* koleksi Arnas.
- Booth, Anne. *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries, A History of Missed Opportunities*. London: Macmillan Press Ltd.
- Burger, D.H. 1970. *Sejarah Ekonomis Sosiologis II*. Jakarta: Pradnja Paramita.
- Burger. 1972. *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia II*. Jakarta: Pradnja Paramita.
- Cramer, J.C.W. 1929. *Het volkscredietwesen in Nederlandsch Indie*. Amsterdam: H.J. Paris.
- Creutzberg, Pieter dan J.T.M. van Laanen (ed)1980. *Changing Economy in Indonesia Vol. 6, Money and Banking 1816-1940*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Creutzberg, Pieter dan J.T.M. van Laanen. 1987. *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Die, Ong Eng. 1981. "Peranan Orang Tionghoa dalam Perdagangan," dalam Mely G. Tan (ed), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Garraghan, Gilbert J. 1957. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.
- Gonggrijp, G. 1928. *Schets Eener Ekonomische Geschiedenis van Nederlandsche-Indie*. Haarlem: De Erven F. Bohn.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengarti Sejarah* (terjemahan Nugroho Notosusanto). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Gutem, V.B. van. 1918. "Tjina Mindering," dalam *Koloniale Studien*.
- Laanen, Jan T. Van. 1988. "Di antara De Javasche Bank dan Ceti-Ceti Cina: Perbankan dan Kredit di Indonesia Pada Zaman Kolonial," dalam Anne Booth et al., (ed) *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988).
- Loriaux, C.L. dan C.L. van Dorn. 1924. "Economic Beschrijving van de Desa Wiroen (Regentschap Koeto-Ardjo) in Betrekking tot de Credietverhouding onder de Bewoners," dalam *Blaadje van Volkscredietwezen*.
- Margono. 1924. "De toekomst van het desabankwezen op Java en Madura," dalam *Blaadje voor het Volkscredietwezen* No. 11, 15 Nopember 1924.
- Notosusanto, Nugroho. 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Inti Idayu.
- Rinardi, Haryono. 1995. "Kredit Untuk Rakyat: Kebijakan Kredit Kecil Perbankan Untuk Usaha Kecil dan Menengah 1904-1990". *Disertasi S-3* tidak diterbitkan



- Scheltema, A.M.P.A. 1985. *Bagi Hasil di Hindia Belanda*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Stibbe, D.G. (ed). 1921. *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie*. 's Gravenhage: M. Nijhoff.
- Suharto, Pandu. 1988. *Sejarah Pendirian Bank Perkreditan Rakyat*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
- Suproyo et al. (Tanpa Tahun). *Masalah Sistem Perkreditan Tradisional di Daerah Pedesaan*. Yogyakarta: Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan.
- Sutjipto, F.A. (ed). 1975. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Van Deventer. 1991. *Bijdragen tot de Kennis van het Landelijk Stelsel op Java*, Jilid I-III (Zalt-Bommel: Joh Norman & Zoon, 1885-1865).
- Verslag. 1920. *Verslag van het volkscredietwesen over het jaar 1920*.
- Wojowasito, S. 1978. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve.
- Yang, Twang Peck. 2004. *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*. Yogyakarta: Niagra.
- Yulianti, Ida. 1999. "Minderung di Pedesaan Jawa Pada Masa Awal Abad ke-20 (1901-1930)," *Lembaran Sejarah*, Volume 2, No. 1. Yogyakarta: Jurusan sejarah Fakultas Sastra UGM.